

ABSTRAK

KETIDAKTERSEDIAAN SURAT KETERANGAN DISABILITAS DI RSUD dr. SOEDOMO TRENGGALEK SEBAGAI TINDAKAN MALADMINISTRASI

Aliza Zhafarina - 120117251

Abstract – The purpose this research to analyze whether unavailability of disability certificate in RSUD dr. Soedomo Trenggalek is a maladministration based on Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The research method used is the normative legal method (normative juridical) with three approaches, namely statute approach, conceptual approach, and case approach. There are three legal materials used, namely primary materials, secondary materials, and tertiary materials. Based on the laws above, the research results show that RSUD dr. Soedomo who does not providing disability certificates for persons with disabilities is considered an act of maladministration. This is based on the fact that people with disabilities have special rights that are not followed by RSUD dr. Soedomo as regulated in Article 19 of Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Beside that, there are actions that are not in accordance with general principles of good governance in the case at RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

Keywords: *Disability, Discrimination, Maladministration, Public Services*

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketidaktersediaan surat keterangan disabilitas di RSUD dr. Soedomo Trenggalek merupakan sebuah maladministrasi apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan dengan menggunakan literatur dan pendapat ahli berdasarkan konsep-konsep (*conceptual approach*). Terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD dr. Soedomo yang tidak menyediakan surat keterangan disabilitas bagi para penyandang disabilitas termasuk sebagai perbuatan maladministrasi. Hal tersebut didasari karena penyandang disabilitas memiliki hak-hak khusus dalam pelayanan publik yang tidak diikuti oleh RSUD dr. Soedomo yang telah diatur dalam pasal 19 UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta terdapat perbuatan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kasus di RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

Kata kunci: *Disabilitas, Diskriminasi, Maladministrasi, Pelayanan Publik.*